

Remisi Hukuman Koruptor dalam Kontruksi Media Program Talkshow Mata Najwa dan Satu Meja The Forum

Agus Triyono^{1*}, Shilvia Ajeng Meidita²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

^{1,2}Jalan A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57162, Indonesia

¹agus.triyono@ums.ac.id

Abstrak

Diskon hukuman bagi para koruptor sedang marak terjadi di Indonesia. Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus korupsi serta suap-menyuap mendapatkan potongan hukuman dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Sedangkan, Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) mendapatkan keringanan hukuman dan hanya dituntut 11 tahun penjara oleh KPK. Pemberitaan mengenai korupsi di Indonesia memiliki nilai berita (news value) yang tinggi di masyarakat. Oleh karena itu, berbagai media memberikan porsi tersendiri dalam memberitakan diskon hukuman koruptor. Dalam memberikan informasi terhadap khlayak, media menyeleksi fakta atas suatu peristiwa yang mereka yakini penting sesuai dengan kepentingan media itu sendiri. Penelitian ini membahas tentang bagaimana media melakukan framing terhadap kasus diskon hukuman koruptor dalam talkshow Mata Najwa dan Satu Meja The Forum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut memandang, memahami, mengkonstruksi serta melakukan pembingkaihan terhadap permasalahan sosial-politik ini. Penelitian ini menggunakan analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan struktur analisis sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konstruksi realitas antara talkshow Mata Najwa dan Satu Meja The Forum dalam memberitakan peristiwa yang sama. Mata Najwa menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat dengan menekankan pemberitaan pada sisi human interest. Sedangkan, Satu Meja The Forum berupaya untuk menciptakan diskusi yang berimbang dengan berfokus pada sisi politik dan permasalahan hukum.

Kata Kunci : *Konstruksi; Framing; Korupsi; Talkshow; Media*

Diterima: 14-06-2023

Disetujui: 26-06-2023

Dipublikasikan: 30-06-2023

Remission of Corruption Punishment in the Media Construction of the Mata Najwa Talkshow Program and Satu Meja The Forum

Abstract

Discounts on punishment for corruptors are rife in Indonesia. Djoko Tjandra and Pinangki Sirna Malasari, who were caught in corruption and bribery cases, received a reduced sentence in the appeal stage at the DKI Jakarta High Court. Meanwhile, Juliari Peter Batubara, a former social minister who was caught in

a corruption case involving social assistance funds (bansos) received leniency and was only sentenced to 11 years in prison by the KPK. News about corruption in Indonesia has a high news value in society. Therefore, various media provide their own portion in reporting discounts on corruptor punishments. In providing information to the public, the media select the facts of an event that they believe is important according to the interests of the media themselves. This study discusses how the media framed the discount case for corruptors' punishment in the talkshows Mata Najwa and Satu Meja The Forum. The purpose of this study is to find out how the two media perceive, understand, construct and frame these socio-political problems. This study uses Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing analysis with syntactic, script, thematic, and rhetorical analysis structures. The results of this study indicate that there are differences in the construction of reality between the talkshow Mata Najwa and Satu Meja The Forum in reporting the same event. Mata Najwa shows his alignment with the community by emphasizing reporting on the human interest side. Meanwhile, Satu Meja The Forum seeks to create a balanced discussion by focusing on the political side and legal issues.

Keywords : Construction; Framing; Corruption; Talkshow; Media

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya berpengaruh besar pada publik. Korupsi dinilai sebagai masalah dunia yang memberikan dampak dalam ekonomi dan stabilitas politik ((Nurul, 2019). Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga berpengaruh terhadap permasalahan sosial masyarakatnya (Astuti & Chariri, 2015). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada enam bulan pertama tahun 2021, ditemukan hasil bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 26,83 triliun atau naik 47,6 persen dari tahun 2020 yang berjumlah Rp.18,173 triliun.

Pemberitaan mengenai kasus korupsi memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei *Transparency International* pada tahun 2020 didapatkan hasil bahwa 92 persen masyarakat Indonesia menganggap tindakan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan besar (*Indonesia - Transparency*, n.d.). Terdapat indikator ketidakpercayaan

masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi yang dijalankan di negeri ini. Beragam kasus korupsi membutuhkan penyelidikan yang lama dan sulit terungkap karena dinilai melibatkan pihak-pihak berkuasa seperti pemerintah (Ananda et al., 2019b).

Pada Juni sampai Agustus 2021, secara berturut-turut masyarakat Indonesia dihadapkan dengan pemberitaan mengenai remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari yang telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi serta suap-menyuap mendapatkan pengurangan hukuman dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Pinangki Sirna Malasari yang sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan, Djoko Tjandra mendapatkan remisi 1 tahun penjara. Sehingga, masa tahanannya menjadi 3 tahun 6 bulan penjara (*PUTUSAN*, n.d.). Di sisi lain, Juliari Peter Batubara yang menjadi terpidana kasus korupsi bantuan dana sosial (bansos) mendapatkan keringanan tuntutan hukuman. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Juliari dengan

hukuman 11 tahun penjara. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang sebelumnya mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi di tengah bencana diancam dengan hukuman mati.

Maraknya pemberian remisi hukuman bagi koruptor membuat media memberikan porsi tersendiri terhadap peristiwa tersebut. Dalam memproduksi berita, media berusaha menciptakan kesadaran dan pemahaman kepada khalayak mengenai suatu peristiwa yang mereka yakini penting dengan menekankan pada isi beritanya (Littlejohn, 2009). Media menampilkan suatu peristiwa dengan mengkonstruksi realitas, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembingkai atau *framing*. Secara umum, *framing* merupakan cara wartawan atau media melihat, memahami, memaknai dan kemudian menampilkannya dalam pemberitaan dengan menonjolkan isu-isu tertentu (Eriyanto, 2008).

Anzari & Fariza (2021) menjelaskan bahwa dalam kasus korupsi bantuan sosial, Kompas.com mengkonstruksi realitas dengan membentuk citra positif pemerintah dan KPK. Informasi detail mengenai proses penangkapan terpidana tidak terlalu diperlihatkan oleh media Kompas.com. Firda & Mulharnetti (2017) menganalisa konstruksi kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik pada koran Kompas dan Tempo. Hasil riset menunjukan bahwa masing-masing media mengkonstruksi sesuai dengan ideologi yang diusung oleh media massa. Kompas membingkai kasus dengan netral. Sedangkan, Tempo menjalankan fungsinya sebagai mata dan telinga publik dengan menekankan keberpihakannya pada masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Echeverría et al. (2021) menemukan fakta bahwa media terkenal di Mexico dan Chili memiliki perbedaan dalam menyajikan peristiwa yang sama terkait dengan kasus korupsi. Chili lebih digambarkan sebagai negara yang minim korupsi di Amerika Latin, peristiwa korupsi yang disajikan oleh media cenderung didepolitisasi. Sedangkan, Mexico lebih sering memberitakan kasus korupsi sebagai berita harian.

Analisis *framing* dinilai sebagai salah satu metode analisis yang dapat melihat bagaimana perbedaan media dalam memberitakan suatu fakta (Ananda et al., 2019). Peristiwa yang sama bisa ditampilkan berbeda apabila diangkat oleh media yang berbeda. Hal tersebut berdasar pada sudut pandang, ideologi serta tujuan yang diyakini oleh suatu media. Ideologi media merupakan citra yang dikemas oleh media massa dan dipahami sebagai realitas yang konkret (Triyono, 2020).

Pada dasarnya *framing* bukan hanya diterapkan dalam pemberitaan di media cetak, wartawan dan media juga mengkonstruksi realitas dalam program *talkshow* yang mereka produksi. *Talkshow* adalah program yang dipandu oleh pembawa acara untuk membahas suatu topik dengan mendatangkan narasumber yang sesuai atau ahli di bidangnya (Morissan, 2015). Namun, peneliti melihat bahwa penelitian dengan metode analisis *framing* terhadap pemberitaan korupsi dalam *talkshow* saat ini masih sukar ditemukan. Beragam penelitian terdahulu dengan metode analisis *framing* yang mengangkat peristiwa korupsi lebih

banyak berfokus pada media cetak dan online sebagai subjek penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode analisis *framing* terhadap pemberitaan pemberian remisi hukuman koruptor dalam program *talkshow*. Program *talkshow* yang menjadi subjek penelitian kali ini adalah program Mata Najwa dan Satu Meja The Forum, keduanya dipandu oleh jurnalis senior yaitu Najwa Shihab dan Budiman Tanuredjo. Mata Najwa tayang di Trans 7, *Youtube Channel* Najwa Shihab serta Narasi.tv sedangkan Satu Meja The Forum tayang di Kompas TV dan *Youtube Channel* KompasTV.

Kedua program tersebut dipilih atas beberapa pertimbangan. 1) Mata Najwa dan Satu Meja The Forum tayang di media TV yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. 2) Keduanya merupakan produk jurnalistik karena menjalankan peliputan serta penyampaian informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik. 3) Kedua program menjunjung tinggi kebebasan pers dengan mengundang narasumber dan memberikan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. 4) Peneliti melihat bahwa kedua program cenderung fokus terhadap pembahasan sosial politik dan diantara program *talkshow* berita lainnya, kedua program tersebut menjadi pelopor pemberitaan diskon hukuman koruptor secara khusus dan mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstruksi *talkshow* remisi hukuman koruptor pada program Mata Najwa dan Satu Meja The Forum?

KAJIAN PUSTAKA

Konstruksi Realitas Media Massa

Realitas menurut Peter L. Berger digambarkan sebagai sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi. Dalam hal ini, realitas bukan hanya dibentuk secara alamiah namun dibangun oleh manusia (Eriyanto, 2008). Konstruksi sosial atas suatu realitas digambarkan sebagai tahapan sosial dari rangkaian aksi dan interaksi yang diciptakan atau dijalankan individu secara terus menerus hingga akhirnya dimaknai sebagai realitas bersama secara subjektif (Berger, Peter L & Luckmann, 1979).

Segala peristiwa yang diberitakan oleh media merupakan hasil konstruksi realitas yang dibangun oleh media itu sendiri (Hamad Ibnu, 2004). Realitas tersebut dibentuk dari rangkaian peristiwa sehingga menghasilkan suatu wacana bermakna (Sitompul, 2014). Konstruksi realitas yang dibangun oleh media akan memberikan dampak kepada publik (Febriana et al., 2020). Dampak tersebut dapat berupa penggiringan perspektif yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik. Dalam membentuk opini publik, media massa setidaknya melakukan tiga upaya secara bersamaan, diantaranya: 1) penetapan simbol politik (pemilihan bahasa), 2) pemilihan dan penonjolan pesan (strategi *framing*), 3) menerapkan rancangan media (agenda setting media) (Hamad Ibnu, 2004). Selain ketiga upaya tersebut, pembentukan opini media massa juga didasari pada keterkaitan media dengan pihak luar, salah satunya pihak yang berkuasa (Coronel, 2010).

Media massa, baik cetak maupun elektronik menggunakan bahasa sebagai unsur utama dalam mengkonstruksi

realitas, bahasa yang digunakan merupakan bahasa verbal dan non verbal (Hamad Ibnu, 2004). Dewasa ini, bahasa bahkan berfungsi dalam memunculkan pemaknaan citra di benak khalayak terhadap suatu realitas yang dibangun oleh media (Nimmo, 1978). Dalam mengemas suatu peristiwa biasanya setiap media memiliki cara tersendiri berdasarkan kepentingan ekonomi maupun ideologi media (Hakim et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap media massa mengkonstruksi realitas atas pemberitaan yang mereka muat untuk tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan internal dan eksternal. Konstruksi realitas bukan hanya dibentuk oleh wartawan sebagai pekerja melainkan mewakili media tersebut secara keseluruhan. Dengan konstruksi realitas, peristiwa yang sama bisa ditampilkan berbeda sesuai dengan apa yang menjadi tujuan media itu sendiri.

Framing Media

Framing atau pembingkai dapat diartikan sebagai bentuk penyajian suatu realitas dimana realitas tersebut tidak ditampilkan secara keseluruhan, tetapi dibelokkan dengan tahap seleksi dan penonjolan isu (Launa, 2020). Analisis *framing* dapat diartikan sebagai suatu kajian yang bersentral pada pengemasan serta pembingkai berita berdasarkan perangkat tertentu di dalamnya (Sari, 2020) serta dapat digunakan peneliti untuk melihat konstruksi realitas yang dibentuk oleh media massa (Pinontoan & Wahid, 2020).

Melalui analisis *framing*, khalayak dapat melihat bagaimana wartawan melakukan seleksi isu dan menulis berita

berdasarkan sudut pandangnya (Juniardi, 2019). Terdapat dua substansi besar dalam *framing*, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta dalam peristiwa tersebut ditulis oleh wartawan dan disajikan oleh media. Pemaknaan peristiwa berkaitan dengan tahap seleksi dan penonjolan isu (Bukhroni & Aisyah, 2020). Sedangkan, penulisan fakta berkaitan pada hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan dan pemakaian kata, kalimat, serta ilustrasi atau gambar yang mendukung (Eriyanto, 2008).

Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, *framing* dimaknai sebagai strategi konstruksi serta tahapan memproses informasi dalam berita (Eriyanto, 2008). Dengan begitu, *framing* dapat menggambarkan bagaimana wartawan menyeleksi fakta atas suatu peristiwa dan menuliskannya dalam berita dengan menonjolkan atau menghilangkan informasi tertentu (Triyono, 2020). Dalam membuat berita, seorang wartawan cenderung melibatkan pemilihan pada aspek-aspek tertentu, seperti : judul, susunan berita serta keberpihakan. Dalam hal ini, keberpihakan biasanya ditampilkan secara halus bahkan tidak disadari (Zulaikha, 2019).

Dalam pemberitaan korupsi, analisis *framing* dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana media menjalankan perannya sebagai agen perubahan dalam meliput serta mengatasi kasus korupsi itu sendiri (Abba-Aji et al., 2021). Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki melihat *framing* berdasarkan empat struktur unit analisis, yakni : sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Dalam penelitian ini, struktur *framing*

tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pemberitaan remisi hukuman koruptor dalam *talkshow* Mata Najwa dan Satu Meja The Forum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada makna dari suatu peristiwa dan bertujuan untuk menganalisis serta menggambarkan suatu

fenomena yang berkaitan dengan sikap, persepsi seseorang atau sekelompok orang (Sugiyono, 2018).

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik dokumentasi. Untuk mempermudah analisis, peneliti membuat salinan transkrip percakapan dalam program *talkshow*. Episode tersebut dipilih karena membahas peristiwa yang sesuai dengan penelitian.

Tabel 1. Data Primer

No	Judul Episode	Tanggal tayang	Sumber
1.	<i>"Keadilan Bersyarat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"</i>	4 Agustus 2021	Mata Najwa, https://www.youtube.com/watch?v=Cn3itb2RtX4&list=PL8sxH-jV_SzSy78DpYwR-UrpLc8hHMLhh
2.	<i>Diskon Hukuman Koruptor Menjelang Hari Kemerdekaan</i>	4 Agustus 2021	Satu Meja, Kompas TV https://www.youtube.com/watch?v=lyeO0Qv_KXo

Sumber : Data penelitian

Sedangkan, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung serta wawancara dengan Mohammad Andica Haradi (Produser Mata Najwa) dan Johar Arief (Produser Satu Meja The Forum).

Pemberitaan mengenai pengurangan hukuman koruptor pada kedua program *talkshow* tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis *framing* milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berkaitan dengan penelitian ini, analisis *framing* dapat digunakan sebagai metode untuk melihat secara sistematis bagaimana suatu media merepresentasikan kasus korupsi (Berti, 2019).

Model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dipilih karena dinilai

dapat menjelaskan lebih detail mengenai konstruksi realitas yang dibangun oleh media (Nadila & Purworini, 2021). Dalam melakukan analisis *framing*, Zhongdang Pan dan Kosicki lebih menekankan pada pendekatan linguistik, mulai dari kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata, serta ilustrasi (Eriyanto, 2008). Dengan begitu, model analisis ini dapat membantu dan mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan *frame* yang dikonstruksi oleh *talkshow* Mata Najwa dan Satu Meja The Forum terkait pemberitaan remisi hukuman koruptor.

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi unit analisis *framing*

ke dalam empat struktur, diantaranya: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik (Eriyanto, 2008).

Sintaksis, dimaknai sebagai proses saat wartawan menyusun konstruksi realitas melalui peristiwa, pandangan, opini, serta kutipan ke dalam suatu berita. Struktur sintaksis dapat dilihat dari *headline*, *lead*, kutipan serta pernyataan. Skrip, dimaknai sebagai proses saat wartawan mengisahkan apa yang menjadi pemikirannya terhadap suatu peristiwa ke dalam berita. Struktur skrip dapat dilihat dari unsur 5W+1H (*What, Why, When, Where, Who + How*). Tematik, dimaknai sebagai proses saat wartawan mengungkapkan pemahaman atas suatu peristiwa melalui preposisi dan hubungan antar kalimat sehingga menjadi satu kesatuan berita. Retorik, dimaknai sebagai proses saat wartawan membuat penekanan khusus dalam suatu berita. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kata, penggunaan metafora, serta ilustrasi atau gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis *framing* menggunakan model Pan dan Kosicki terhadap pemberitaan mengenai remisi hukuman koruptor dalam program *talkshow* Mata Najwa dan Satu Meja The Forum yang masing-masing tayang pada 4 Agustus 2021, peneliti mendapatkan hasil yang dijabarkan sebagai berikut :

Tebang Pilih Hukum di Indonesia

Analisis *framing* dalam program *talkshow* ini fokus pada episode “Keadilan Bersyarat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berdasarkan struktur sintaksis, *headline* pada program cenderung menunjukkan sikap objektif dengan tidak

memberikan pandangan dari perorangan atau institusi tertentu. *Headline* episode yang digunakan oleh Mata Najwa merupakan reduksi dari Pancasila poin kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan begitu, peneliti melihat bahwa latar informasi yang berusaha ditonjolkan Mata Najwa dalam episode kali ini, berkaitan dengan diskriminasi hukum yang menjadi masalah sosial-politik di Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Najwa Shihab di akhir segmen.

Gambar 1. Tangkapan layar di Satu Meja



Sumber: Satu Meja, Kompas TV

https://www.youtube.com/watch?v=lyeO0Qv_KXo

Gambar 2. Tangkapan layar Narasi TV



Sumber: Mata Najwa, Trans 7

https://www.youtube.com/watch?v=Cn3itb2RtX4&list=PL8sxH-jV_SzSy78DpYwR-UrpLc8hHMLhh

"Definisi tentang keadilan diperdebatkan sepanjang masa, dirumuskan ahli hukum politik, sampai agama. Jangan sampai berhenti di atas kertas, sekedar coretan keadilan juga mesti dirasakan dalam keseharian..." (Najwa Shihab, segmen 7)

Mata Najwa juga menggunakan dua kutipan narasumber untuk dijadikan *sub-headline*. Pertama, dalam segmen 5 "Warga Gugat Ganti Rugi Bansos : Ini Hak Kami" yang diambil dari pernyataan Eny Rochayati (Perwakilan Warga Penggugat Bansos). Kedua, dalam segmen 7 "Rakyat Dipaksa Tak Waras Melihat Penegakan Hukum" yang diambil dari pernyataan Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW).

Dalam menyusun fakta, Mata Najwa menampilkannya melalui skema atau alur tertentu. Kesempatan untuk menjelaskan paling banyak diberikan kepada narasumber yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan bahasa yang santun atau tidak menyudutkan. Terlihat juga bahwa Najwa Shihab berupaya untuk mengangkat sisi *human interest* pada diskusinya.

"Bagaimana bayi bu selama di LP? Saya tidak bisa membayangkan, ibu saja pasti sudah sulit, harus bawa bayi umur 6 bulan dengan kondisi seperti itu..." (Najwa Shihab, segmen 2)

"Nenek mau cerita sudah berapa hutangnya sekarang nek? tidak apa-apa kalau nenek tidak mau sebut, tapi saya mau tahu, siapa tahu nanti ada pemirsa Mata Najwa yang mau bantu Nek" (Najwa Shihab, segmen 3)

"Ibu meminta ganti ruginya sebesar 16 Juta. Itu hitung-hitungannya bagaimana

bu? Kenapa yang diminta hanya 16 Juta?" (Najwa Shihab, segmen 5)

Gaya bicara Najwa Shihab ketika melakukan dengan wawancara dengan Isma Khaira dan Nenek Hasnia dilakukan dengan bahasa yang santun dan empati mendalam melalui ekspresi wajah. Hal ini berbeda ketika Najwa Shihab mengajukan pertanyaan kepada Dini Shanti Purwono sebagai perwakilan dari pemerintah dan Maqdir Ismail sebagai perwakilan dari pihak Juliari Batubara yang cenderung tegas dan mengedepankan aspek keadilan dalam hukum.

"Iya, padahal Presiden katanya sudah prihatin, sudah meminta untuk direvisi, tapi tidak direvisi dan sebagainya ya. Jadi, lebih susah Presiden atau lebih susah rakyat ya Mbak Dini?..." (Najwa Shihab, segmen 2)

"Pak Maqdir jadi anda katakan, justru yang terzalimi ini pak Juliari begitu ya?" (Najwa Shihab, segmen 4)

Selain itu, kesempatan berbicara di awal dan akhir *talkshow* diberikan kepada Kurnia Ramadhana dan Boyamin Saiman sebagai penggiat anti korupsi. Peneliti melihat bahwa Mata Najwa berupaya untuk menonjolkan isu dengan mempertegas pendapat dari kedua narasumber. Sedangkan, kesempatan berbicara Dini Shanti Purwono dan Maqdir Ismail sebagai pihak yang dianggap tidak mewakili masyarakat tidak begitu terlihat karena ditempatkan di akhir segmen. Jika Najwa Shihab memberikan pertanyaan pada keduanya di tengah segmen, maka Kurnia Ramadhana dan Boyamin Saiman akan diberikan kesempatan menanggapi.

Dengan skema tersebut, Mata Najwa mencoba memberikan pemahaman kepada khalayak bahwa pendapat Dini Shanti Purwono dan Maqdir Ismail merupakan pendapat minoritas.

Struktur Skrip dalam episode *talkshow* ini berusaha memberikan porsi yang lebih pada unsur *what*, *why*, dan *how*. Unsur *what* secara garis besar dapat terlihat dari pernyataan Najwa Shihab selaku pembawa acara dalam menyampaikan topik bahasan di awal segmen.

"...Gebyar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi, inilah yang dipertontonkan di depan publik saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi kekerasan dan hukuman yang tidak masuk akal"(Najwa Shihab, segmen 1)

Sedangkan, ketiga unsur lainnya sekaligus dapat dilihat dari pemaparan fakta dan pendapat yang disampaikan oleh narasumber dari sudut pandang masing-masing.

Jika dilihat dari struktur tematik, terdapat tiga tema yang berusaha ditonjolkan oleh Mata Najwa dalam episode ini. *Pertama*, tren remisi hukuman koruptor. Hal ini ditampilkan dari keseluruhan diskusi dan ditekankan dalam beberapa segmen khusus yang membahas perjalanan kasus Pinangki Sirna Malasari, Djoko Chandra, serta Juliari Peter Batubara sebagai koruptor yang mendapatkan diskon dan keringanan hukuman. Penggunaan kata "gebyar diskon" memiliki makna bahwa hal remisi dilakukan terhadap banyak terpidana koruptor. Terminologi ini mampu memberikan kesan negatif pada lembaga peradilan yang memberikan

remisi kepada banyak terpidana. *Kedua*, perbandingan hukuman bagi para elit dan rakyat biasa yang ditampilkan melalui diskusi mendalam Najwa Shihab dengan Isma Khaira, Tri Ariadi Rahmat, Hasnia, serta Eny Rochayati sebagai narasumber dari perwakilan masyarakat yang dirugikan. *Ketiga*, pertanyaan mengenai konsistensi presiden dalam menangani kasus korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari satu segmen khusus yang diskusinya didominasi oleh Najwa Shihab dan Dini Shanti Purwono.

Struktur retorik pada *talkshow* ini terlihat dari penggunaan metafora, grafis, *videotape* (VT), serta pemberian label. Adapun metafora yang ditampilkan, diantaranya : mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit, gelagat keadilan sedang menjauh dari sebuah negeri, serta metafora gelas setengah penuh, gelas setengah kosong, gelas kosong, bahkan gelas pecah yang dianalogikan sebagai kinerja pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Peneliti melihat bahwa metafora-metafora yang tersaji menyoroti kinerja pemerintah dan penegak hukum yang dianggap tidak dapat diapresiasi dalam menangani kasus korupsi.

Gambar-gambar yang ditampilkan berupa tangkapan layar mengenai pemberitaan diskon hukuman koruptor dari berbagai media, *meme* Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari, serta komentar netizen di sosial media mengenai peristiwa ini. Adapun VT yang ditampilkan, antara lain : cuplikan pernyataan ketua KPK terkait hukuman mati bagi terpidana korupsi di tengah bencana, warga yang menuntut kasus korupsi bansos, persidangan koruptor yang

diedit dengan musik parodi, serta video grafis penggambaran perjalanan kasus beberapa narasumber yang mendapatkan diskriminasi perlakuan hukum.

Selain itu, Mata Najwa juga memberikan label kepada narasumber Isma Khaira sebagai “Ibu Bayi yang Terjerat UU ITE”. Peneliti menilai bahwa Mata Najwa ingin mengangkat sisi sosial dengan menggambarkan narasumber sebagai perwakilan dari para perempuan di Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan hukum, berbanding terbalik dengan Pinangki Sirna Malasari yang diberikan diskon hukuman oleh hakim dengan pertimbangan sebagai seorang ibu dan memiliki anak kecil.

Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dilihat dari analisis pada struktur sintaksis, *headline* yang digunakan oleh *talkshow* Satu Meja The Forum “Obral Diskon Hukuman Koruptor” cenderung bersifat general. *Headline* yang digunakan oleh program ini cukup objektif dengan tidak memberikan pandangan dari perorangan atau institusi tertentu. *Headline* tersebut berupaya menggambarkan informasi kepada khalayak bahwa sedang terjadi krisis sistem peradilan di Indonesia yaitu maraknya pengurangan hukuman bagi para koruptor dengan berbagai dalih.

Saat berjalannya diskusi, peneliti melihat bahwa Budiman Tanuredjo selaku pembawa acara, menekankan isu dengan beberapa kali mengutip pernyataan narasumber, seperti kalimat harapan palsu, *gimmick* atau permainan citra, dan gagal menjalankan fungsinya, dimana

kalimat-kalimat tersebut disampaikan oleh Bivitri Susanti dan Benny Harman dalam pembahasan mengenai perubahan arah pemberantasan korupsi oleh pemerintah, KPK, serta pengadilan di Indonesia.

Dalam menyusun fakta, Satu Meja The Forum berusaha untuk menampilkannya dengan alur atau skema tertentu melalui pertanyaan dan pemberian kesempatan pada narasumber untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam *talkshow*, kesempatan berbicara pertama kali diberikan kepada Ali Fikri sebagai juru bicara KPK untuk mengklarifikasi kinerja lembaga ini terkait kasus korupsi bansos oleh Juliari Peter Batubara, yang dinilai sebagai langkah mundur KPK dalam pemberantasan korupsi. Sama halnya dengan bagaimana program ini menyusun suatu fakta mengenai tren sikap hakim banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait maraknya pengurangan hukuman koruptor. Pertanyaan serta pemberian kesempatan bicara pertama diberikan kepada Miko Ginting sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY). Selanjutnya, atas keterangan atau klarifikasi yang diberikan oleh pihak KPK dan KY, Budiman Tanuredjo akan memberikan kesempatan untuk Bivitri Susanti dan Benny Harman menanggapi.

Dalam berjalannya diskusi, pengulangan pertanyaan mengenai masalah yang sama dilakukan oleh pembawa acara. Uraian pendapat yang disampaikan oleh Ali Fikri dan Miko Ginting dipudarkan dengan mencoba menekankan pendapat dari Bivitri Susanti dan Benny Harman sebagai narasumber yang memiliki pandangan berbeda dengan pihak KPK dan KY. Budiman Tanuredjo selaku pembawa acara juga memberikan

probing atau pertanyaan beruntun kepada Ali Fikri dan Miko Ginting yang peneliti lihat sebagai ketidakpuasannya atas jawaban dari kedua narasumber tersebut.

Meskipun begitu, peneliti melihat bahwa Satu Meja The Forum berupaya untuk tidak menciptakan keberpihakan dengan tetap mendukung KPK dan KY dalam menangani permasalahan remisi hukuman koruptor. Di akhir segmen, Ali Fikri dan Miko Ginting diberikan kesempatan untuk memaparkan tindakan dalam mengawasi dan memberantas kasus korupsi di Indonesia, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"...Bung Miko, ini kan komisi yudisial kewenangannya berbasis konstitusi. Apa yang akan dilakukan oleh komisi yudisial untuk minimal pemberantasan korupsi tetap menjadi semangat atau elan dari pemerintah yang ada sekarang ini?" (Budiman Tanuredjo, Segmen 4)

"...Bung banyak masyarakat yang pesimis dengan pemberantasan korupsi, tingkat kepercayaan pada KPK juga dalam tren turun, apa yang akan dilakukan oleh KPK?" (Budiman Tanuredjo, segmen 4)

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan Budiman Tanuredjo di akhir segmen, yang menyatakan bahwa permasalahan tren pemberian remisi hukuman koruptor ini terjadi akibat adanya oknum.

"Mata air keadilan itu, kini sedang dikotori oknum penegak hukum, butuh komitmen baru untuk membersihkan mata air keadilan" (Budiman Tanuredjo, segmen 4)

Struktur skrip pada program *talkshow* ini ditekankan pada unsur *what*, *why*,

dan *how*. Unsur *what* secara general dapat dilihat saat Budiman Tanuredjo memberikan pernyataan di awal segmen untuk menginformasikan bahasan dalam episode ini.

"Apa yang tengah terjadi dengan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini?..." (Budiman Tanuredjo, segmen 1)

Sedangkan, ketiga unsur secara keseluruhan dapat dilihat dari pernyataan masing-masing narasumber yang mewakili pandangan masyarakat maupun pemerintah.

Jika dilihat dari struktur tematik, program *talkshow* ini merujuk pada dua tema besar yang ditonjolkan. *Pertama*, melemahnya keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi. Satu Meja the Forum mencoba menekankan informasi pada berita aktual sebagai respon terhadap tuntutan yang diberikan oleh KPK atas pernyataan Firli Bahuri mengenai hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi di tengah bencana. *Kedua*, tren remisi hukuman koruptor di Indonesia. Tema ini ditampilkan melalui rincian berbagai fakta mengenai perjalanan kasus koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman, perbandingan hukuman koruptor sekarang dengan era Soeharto dan dipertegas dengan pandangan yang disampaikan oleh Bivitri Susanti serta Benny Harman terkait pihak KPK dan lembaga kehakiman yang dinilai gagal menjalankan fungsinya.

Struktur retorik pada *talkshow* ini ditampilkan melalui penggunaan metafora, infografis serta videotape (VT). Adapun metafora yang ditampilkan dalam *talkshow* ini, diantaranya : pemberantasan korupsi

di negeri ini semakin jauh panggang dari api, korupsi justru ramai-ramai di kebiri, publik teriak karena rasa keadilan publik tercederai, hukum yang tegak adalah mata air bagi keadilan, serta hukum yang bengkok atau dibengkokkan kian menjauhkan bangsa ini dari cita-cita negara hukum yang demokratis. Berdasarkan metafora-metafora tersebut, peneliti melihat bahwa Satu Meja The Forum berupaya menyoroti semangat pemberantasan korupsi yang semakin menurun karena terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan, KPK, serta lembaga kehakiman.

Infografis yang ditampilkan merupakan rangkuman mengenai perjalanan kasus koruptor yang dibuat oleh tim Satu Meja The Forum. Sedangkan, gambar dan VT yang ditampilkan meliputi pernyataan ketua KPK mengenai hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi di tengah bencana, penangkapan dan proses persidangan Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra, serta Juliari Peter Batubara. Namun, VT yang paling sering ditampilkan selama berjalannya diskusi adalah video penangkapan serta persidangan Juliari Peter Batubara. Dengan begitu, terlihat bahwa Satu Meja The Forum berupaya mengkonstruksi realitas dalam diskusi yang mengarah pada KPK sebagai pihak yang terlibat secara langsung.

Sebagai bagian dari *talkshow* berita di Indonesia, baik Mata Najwa dan Satu Meja The Forum menjalankan *framing* terhadap pemberitaan yang mereka angkat. Dalam pemberitaan pengurangan hukuman koruptor, terlihat bahwa kedua *talkshow* ini mengkonstruksi realitas yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-

masing. Sebelum informasi disebarkan dan dikonsumsi oleh khalayak, kedua media menjalankan kegiatan *gatekeeping* atau memfokuskan proses pencarian sampai pengelolaan berita oleh tim redaksi. Kegiatan *gatekeeping* ini biasanya didasari pada *value* atau nilai budaya yang menjadi dasar tiap-tiap media (Hutagalung, 2016)

Berdasarkan episode yang menjadi fokus penelitian kali ini, Mata Najwa sebagai bagian dari Narasi.tv yakni salah satu *platform* media digital di Indonesia masih bekerjasama dengan Trans 7. Namun, pihak Trans 7 hanya menjadi pelaksana produksi dan memberikan masukan dari sisi *entertainment*. Sedangkan, riset dan konten merupakan tanggung jawab Narasi.tv. Dalam memproduksi konten, Narasi.tv memiliki tiga *value* atau nilai budaya yang mereka usung, diantaranya : antikorupsi, toleransi, serta partisipasi. Dengan begitu, dalam menjalankan kegiatan *gatekeeping* dan memproduksi konten pada setiap episodenya, Mata Najwa berpedoman pada nilai-nilai budaya Narasi.tv sebagai media pembawanya.

Jika dikaitkan dengan episode yang diteliti, nilai antikorupsi dan kolaborasi terlihat lebih dominan. Mata Najwa sendiri konsisten untuk memberikan informasi mengenai isu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bahkan korupsi dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang melibatkan masyarakat (Munanjar et al., 2022). Disisi lain, nilai kolaborasi tercermin dari adanya komunitas Mata Kita yang dibentuk oleh Narasi.tv. Komunitas ini merupakan tempat bagi anak muda khususnya penonton Mata Najwa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan yang

dilakukan oleh anggota komunitas Mata Kita adalah diskusi mengenai permasalahan sosial politik, seperti isu korupsi. Dengan begitu, nilai antikorupsi dan kolaborasi merepresentasikan bahwa Mata Najwa menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap pemerintah khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku antikorupsi itu sendiri.

Sementara, Satu Meja The Forum merupakan produk Kompas TV yang tergabung dalam Kompas Gramedia Group. Kompas TV yang mendeklarasikan diri sebagai televisi berita ini memiliki komitmen menjadi media yang independen dan terpercaya (*About Us - Kompas TV*, n.d.). Dalam menjalankan kegiatan *gatekeeping*, Satu Meja The Forum juga berdasar pada *value* atau nilai budaya yang diusung oleh Kompas TV sebagai media pembawanya. Jika dikaitkan dengan episode yang diteliti, nilai independen tercermin dari upaya Satu Meja The Forum untuk *cover both side* dengan menciptakan diskusi yang berimbang atau tidak memihak. Sementara, nilai terpercaya tercermin dari profesionalisme serta kesesuaian pemilihan narasumber dengan isu yang dibahas.

Pada dasarnya, konstruksi realitas dalam media massa dibentuk dari pemilihan dan penentuan narasumber, sudut pandang, serta penggambaran peristiwa (Boer et al., 2020). Dalam episode “Keadilan Bersyarat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Mata Najwa menghadirkan 8 narasumber, diantaranya : Kurnia Ramadhana (Peneliti ICW), Boyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Isma Khaira (Ibu Bayi yang Terjerat UU ITE), Tri Ariadi Rahmat (Kuasa Hukum Hardianti dari PBH PERADI Makassar), Nenek Hasnia (Ibu Hardianti), Eny Rochayati (Perwakilan Rakyat Penggugat Bansos), Maqdir

Ismail (Kuasa Hukum Juliari Batubara), serta Dini Shanti Purwono (Staf Khusus Presiden Bidang Hukum). Sedangkan, dalam episode “Diskon Hukuman Koruptor” Satu Meja The Forum menghadirkan 4 narasumber, diantaranya : Ali Fikri (Juru Bicara KPK), Miko Ginting (Juru Bicara Komisi Yudisial), Benny Harman (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat), dan Bivitri Susanti (Pegiat Antikorupsi dan Dosen STH Indonesia Jentera).

Berdasarkan pemilihan dan perbandingan kuantitas narasumber yang dihadirkan, terlihat jelas bahwa Mata Najwa menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat. Sedangkan, Satu Meja The Forum berupaya untuk menciptakan diskusi yang berimbang. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dengan judul “*The Construction Mata Najwa Program on Episode “Gerabak-Gerubuk Urus Pagebluk in Trans 7 ”*” oleh (Salsabila, n.d.). Penelitian yang membahas mengenai pilkada di tengah pandemi ini, memperlihatkan bahwa Mata Najwa menunjukkan sikap kontranya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Hal tersebut diamati dari kuantitas narasumber hingga jalannya diskusi. Disisi lain, Hasil tersebut juga sesuai dengan temuan (Firda & Mulharnetti, 2017) dimana Kompas TV memberitakan kasus korupsi *E-KTP* dengan netral atau tidak memihak.

Lebih lanjut, baik Mata Najwa dan Satu Meja The Forum mengambil sudut pandang dan menekankan pemberitaan yang berbeda terhadap permasalahan remisi hukuman koruptor. Mata Najwa cenderung mengangkat sisi sosial ketimbang pedoman hukum. Keberpihakannya terhadap masyarakat dilihat dari bagaimana Najwa Shihab menekankan premis pertanyaan pada ironi dengan mengkomparasikan penerimaan

hukuman terhadap petinggi negeri dan masyarakat biasa. Mohammad Andica Haradi, selaku produser Mata Najwa menyatakan bahwa *talkshow* ini merupakan ujung tombak pemberitaan, Mata Najwa bukan hanya menjadi pengawas bagi pemerintah. Namun, ingin membuat setiap orang yang menonton tayangan ini merasa perlu untuk mengambil tindakan.

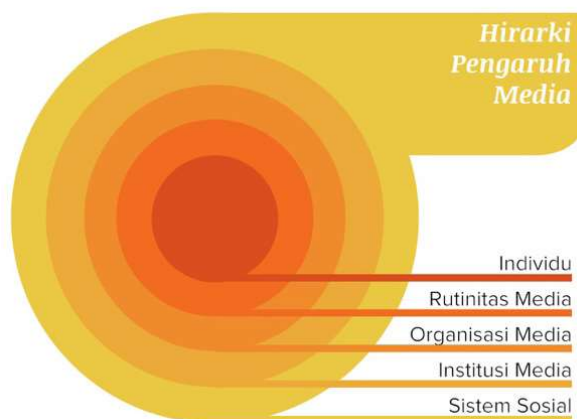
Disisi lain, Satu Meja The Forum menekankan pemberitaan pada permasalahan politik dan pedoman hukum. Jika Mata Najwa secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat dan menyudutkan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Satu Meja The Forum berupaya untuk membangun citra positif KPK dan KY dengan memberikan kesempatan berbicara di akhir segmen. Hasil tersebut juga sesuai dengan temuan dalam penelitian (Anzari & Fariza, 2021) dimana Kompas TV mengkonstruksi citra positif pemerintah dan KPK dalam pemberitaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Johar Arief selaku produser Satu Meja The Forum menerangkan bahwa *talkshow* ini memang berfokus pada pembahasan hukum dan seiring berjalannya waktu permasalahan politik juga semakin diminati masyarakat. Selain berfungsi sebagai pengawas bagi pemerintah, peneliti melihat bahwa Satu Meja The Forum menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendengarkan argumentasi dari masing-masing pihak politik mengenai isu yang dibahas. Dalam beberapa kajian sebelumnya, Kompas sebagai rumah besar Kompas TV dan Satu Meja The Forum mengedepankan aspek humanisme dalam konstruksi yang disajikan (Musyaffa & Romadlan, 2023).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pers, baik Mata Najwa dan Satu Meja The Forum memiliki sudut pandang dan tujuan yang mereka

yakini benar. Mata Najwa memandang bahwa pers tidak boleh netral dan harus membela pihak yang mereka anggap dirugikan, dalam hal ini adalah masyarakat. Sedangkan, Satu Meja The Forum menjalankan fungsi pers dengan memposisikan diri diantara masyarakat dan pemerintah. Satu Meja The Forum berupaya menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan jembatan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah. Pada dasarnya, *framing* yang menekankan pada kinerja pemerintah untuk mengevaluasi pengabaian prosedur birokrasi secara ilegal akan mempengaruhi cara pemerintah melihat korupsi itu sendiri (Zizumbo Colunga & Meza, 2021).

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi isi media, diantaranya : individu jurnalis, rutinitas media, organisasi media, institusi media, serta ideologi (Krisdinanto, 2017).

Gambar 2. Hirarki Pengaruh Media



Sumber:Krisdinanto (2017)

Menurut (Nurhajati & Wijayanto, 2019) pemilik media tidak dapat dipisahkan terhadap tendensi isi media. Kepentingan pemilik dan ekonomi kerap menjadi arah media mengkonstruksi realitas. Dalam Mata Najwa, Najwa Shihab

sebagai pemilik Narasi.tv memiliki peran pemetodenting karena ikut berdiskusi langsung terkait konten yang akan dibahas dalam setiap episodenya. Sedangkan, Satu Meja The Forum menjalankan *self regulation* untuk menjaga objektivitas. Selain itu, dalam memilih isu yang akan diangkat menjadi konten, kedua *talkshow* melihat pada peristiwa yang sedang marak diperbincangkan atau berdampak bagi banyak orang.

Untuk kepentingan ekonomi, keduanya menjalankan konvergensi media. Konvergensi media merupakan proses integrasi yang dilakukan oleh industri media dengan memanfaatkan digitalisasi (Nugroho, 2020). Digitalisasi menyebabkan pola konsumsi media oleh masyarakat berubah. Dengan perubahan ini, media perlu menjalankan konvergensi media untuk menjaga eksistensi dari media itu sendiri.

Dalam hal ini, Mata Najwa dan Satu Meja The Forum menjalankan konvergensi menggunakan *multiplatform*. *Talkshow* bukan hanya ditayangkan secara konvensional melalui televisi. Namun, keduanya memanfaatkan sosial media untuk menjalankan konvergensi media ini. Youtube digunakan untuk menayangkan kembali pemberitaan secara penuh. Instagram digunakan sebagai media promosi episode yang akan ditayangkan serta *highlight* pemberitaan versi durasi pendek. Sedangkan, website digunakan untuk menyajikan pemberitaan secara online. Disamping menjalankan perannya sebagai pers karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi, hal tersebut juga merujuk pada kepentingan ekonomi masing-masing. Meskipun begitu, secara

garis besar peneliti melihat bahwa Mata Najwa dan Satu Meja The Forum tidak semata-mata tunduk pada pemilik media sebagai arah dalam mengkonstruksi pemberitaan.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai konstruksi realitas dalam *talkshow* Mata Najwa dan Satu Meja The Forum terkait pemberitaan remisi hukuman koruptor. Keduanya sama-sama berupaya untuk menggiring opini publik dengan menanamkan pemahaman mengenai remisi hukuman koruptor sesuai dengan ideologi media masing-masing. Selain itu, keduanya juga menjalankan fungsi media sebagai *watchdog*. *The press is a watchdog. A good watchdog barks at things that are suspicious* (Nai, 2019). Keduanya memiliki cara masing-masing untuk mengkritik dan melakukan pengawasan terhadap lembaga serta pemerintah sebagai pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap permasalahan diskon hukuman koruptor.

KESIMPULAN

Dalam menyajikan suatu peristiwa setiap media mengkonstruksi realitas. Konstruksi realitas antara media satu dengan yang lainnya dapat berbeda sesuai dengan tujuan dari media itu sendiri. Mata Najwa dan Satu Meja The Forum sebagai media yang diteliti memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan peristiwa diskon hukuman koruptor. Mata Najwa menekankan pemberitaan pada sisi *human interest*, sedangkan Satu Meja The Forum berfokus pada sisi politik dan hukum. Riset mengenai framing Kompas.com pada kasus korupsi dana bantuan sosial menunjukkan bahwa media Kompas.

com memberikan penekanan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang setimpal (Mulya & Aisyah, 2022).

Konstruksi yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa sebuah isu yang sama dapat disajikan secara berbeda oleh media massa. Framing media tersebut menunjukkan bagaimana ideologi media ditampilkan oleh redaksi melalui produk yang dilakukan. Proses melakukan framing dimulai dari seleksi isu serta penonjolan isu. Dengan demikian, tentunya tidak ada kebenaran mutlak dari setiap konstruksi media. Masing-masing media memiliki orientasi ideologis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba-Aji, M., Balabanova, D., Hutchinson, E., & McKee, M. (2021). How Do Nigerian Newspapers Report Corruption in the Health System? *International Journal of Health Policy and Management*, 10(2), 77–85. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.37>
- About Us - Kompas TV. (n.d.).
- Ananda, M. F. S., Nugraha, A. R., & Sumartias, S. (2019a). Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 3(2), 253. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>
- Ananda, M. F. S., Nugraha, A. R., & Sumartias, S. (2019b). Framing Analysis of Mass Corruption News in Detik.Com Online Media. *Indonesian Journal of Communications Studies*, 3(2), 253. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>
- Anzari, P. P., & Fariza, N. P. (2021). Analisis framing pemberitaan penangkapan juliari batubara dalam korupsi dana bansos covid-19 pada kompas.com. *Jurnal Kajian Media*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.25139/jkm.v5i1.3618>
- Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 11–22.
- Berger, Peter L & Luckmann, T. (1979). *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Penguin Books.
- Berti, C. (2019). Rotten Apples or Rotten System? Media Framing of Political Corruption in New Zealand and Italy. *Journalism Studies*, 20(11), 1580–1597. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1530068>
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85–104. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>
- Bukhroni, F. L. W., & Aisyah, V. N. (2020). Framing Kasus Ujaran Kebencian di Televisi. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.15990>
- Coronel. (2010). Corruption and the Watchdog Role of the News Media. *Public Sentinel: News Media and Governance Reform*.

- Echeverría, M., González, R. A., & Tagle Montt, F. J. (2021). Corruption framing in Latin American media systems. A comparison between Mexico and Chile. *The Journal of International Communication*, 27(2), 149–171. <https://doi.org/10.1080/13216597.2021.1904268>
- Eriyanto. (2008). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (V). LKiS Pelangi Aksara.
- Febriana, R. P., Sukarelawati, S., & Fitriah, M. (2020). Framing Device in Gamson and Modigliani Model About the News of Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Komunikasi*, 6(2), 47–58. <https://doi.org/10.30997/jk.v6i2.2753>
- Firda, J., & Mulharnetti, S. (2017). Konferensi Nasional Komunikasi. *Konstruksi Media Republika Online Terhadap Pidato Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan*, 01(01), 657–667.
- Hakim, L., Amina, D. N. W. R., & Si, M. (2021). Analisis Framing Acara Rosi Di Kompas Tv Episode Ganja : Mitos Dan Fakta Periode 6 Februari 2020. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(1), 31–41.
- Hamad Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Critical Discourse Analisis Terhadap Berita-Berita Politik*. Granit.
- Hutagalung, I. (2016). *BUDAYA ORGANISASI DAN DINAMIKA RUANG REDAKSI (Proses Gatekeeping di Kompas dan Koran Tempo)*. Indonesia - Transparency. (n.d.).
- Juniardi, H. S. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota pada Pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com*.
- Krisdinanto, N. (2017). Anomali dan teori hirarki pengaruh terhadap isi media. *KOMUNIKATIF : Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3(1), 1–18.
- Launa, L. (2020). Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto'S Image in Republika.Co.Id March–April 2019 Edition. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>
- Littlejohn, S. W. & K. A. F. (2009). *Teori Komunikasi, edisi 9* (9th ed.). Salemba Humanika.
- Morissan. (2015). *Manajemen media penyiaran : strategi mengelola radio & televisi* (Morissan,). Fajar Interpretama Mandiri.
- Mulya, V. C. H., & Aisyah, V. N. (2022). MEMAHAMI BINGKAI MEDIA ONLINE DALAM NARASI HUKUMAN MATI KASUS KORUPSI BANSOS. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 14(2), 190–214. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v14i2.17830>
- Munanjar, A., Mirza, R., & Rhatika, D. (2022). Rerpresentasi Nilai Antikorupsi, Toleransi, dan Partisipasi Program Mata Najwa di Narasi. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 22, 42–49. <https://doi.org/10.31294/jc.v22i1.12425>
- Musyaffa, A., & Romadlan, S. (2023). Citra Ganjar Pranowo dalam Konflik Desa Wadas Di Media Online. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 98–117.

- <https://doi.org/10.23917/komuniti.v15i1.21788>
- Nadila, S. L., & Purworini, D. (2021). STRATEGI IMAGE RESTORATION PADAPT. ALPEN FOOD INDUSTRI (ANALISIS FRAMING PADA KASUS PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEGUGURAN AKIBAT TEKANKERJAPADA PABRIK ES KRIM AICE DALAM CNN INDONESIA). *PRecious: Public Relations Journal*, 2(1), 219–245. <https://ejournal.uksw.edu/precious/article/view/5074/1943>
- Nai, A. (2019). Watchdog Press. *The International Encyclopedia of Journalism Studies*, 1–6. <https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0167>
- Nimmo, D. (1978). *Political Communication And Public Opinion In America*. Goodyear Publishing.
- Nugroho, C. (2020). *buku Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. (2019). Kepemilikan Media dan Isi Pemberitaan Koran Tempo. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1>
- Nurul, H. (2019). *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia*. Com. 2(2).
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.
- PUTUSAN. (n.d.).
- Salsabila, J. (n.d.). *The Construction Mata Najwa Program on Episode “Gerabak - Gerubuk Urus Pagebluk” in Trans7*. 71–82.
- Sari, A. W. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Isu Korupsi Politikus Romahurmuziy Pada Situs Berita Daring Kompas, Tempo, Dan Detik. *Prosiding Seminar Literasi V*, 30–42.
- Sitompul, P. (2014). KONSTRUKSI REALITAS PERAN KPK DALAM PEMBERITAAN ONLINE TERKAIT KASUS KORUPSI (Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18(2), 169. <https://doi.org/10.31445/jskm.2014.180203>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. CV Alfabeta.
- Triyono, A. (2020). Framing analysis of village funding corruption in media suaramerdeka.com in central java, indonesia, 2019. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1154–1163. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.136>
- Zizumbo Colunga, D., & Meza, O. (2021). Flying Under the Radar: How Frames Influence Public Officials’ Perceptions of Corruption. *Political Behavior*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09745-3>

Zulaikha, N. H. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 pada Situs Berita Daring Indonesia. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 79–98. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.4942>